

YOGYAKARTA
OKTOBER 2017

PROSIDING

ISBN 978-602-60245-0-3

ECONOMIC & SOCIAL

**SEMINAR NASIONAL TAHUN KE-3
CALL FOR PAPERS DAN PAMERAN HASIL
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEMENRISTEKDIKTI RI**

**TATA KELOLA EKONOMI INDONESIA DALAM MASYARAKAT
EKONOMI ASEAN DAN MENINGKATKAN MARTABAT BANGSA
BERBASIS SUMBER DAYA ENERGI DAN MEMPERKOKOH SINERGI
PENELITIAN ANTAR PEMERINTAH, INDUSTRI, DAN PERGURUAN TINGGI**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2017**



**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL TAHUN KE-3, *CALL FOR PAPER*, DAN
PAMERAN HASIL PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT
KEMENRISTEKDIKTI RI**

**PERAN SENTRAL DESA MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI, PENINGKATAN
PRODUKTIFITAS RAKYAT, DAYA SAING BANGSA UNTUK MEMPERKOKOH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

YOGYAKARTA, 10-11 OKTOBER 2017

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
2017**

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL TAHUN KE-3
DAN CALL FOR PAPER**

**PERAN SENTRAL DESA MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI, PENINGKATAN
PRODUKTIFITAS RAKYAT, DAYA SAING BANGSA UNTUK MEMPERKOKOH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Cetakan Tahun 2017

Katalog Dalam Terbitan (KDT):

Prosiding Seminar Nasional dan *Call For Paper*

Peran Sentral Desa Menuju Kemandirian Ekonomi, Peningkatan Produktifitas Rakyat, Daya Saing Bangsa Untuk Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia

LPPM UPNVY

260,hlm;21x29.7cm.

LPPM UPNVY PRESS

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Kapuslitbang LPPM UPNVY

Rektorat Lantai 4, LPPM, Puslitbang

Jln. SWK 104 (Lingkar Utara) Ring Road, Condong Catur, Yogyakarta 55283

Telpon (0274) 486733, ext 154

Fax. (0274) 486400

www.lppm.upnyk.ac.id

Email: puslitbang.upn@gmail.com

Penata Letak : 1. Sri Utami
2. Nanik Susanti
3. Yasa Pramudita Dyan Mardika

Desain Sampul : Zuhdan Nurul Fajri

Distributor Tunggal

LPPM UPNVYRektorat Lantai 4, LPPM, Puslitbang

Jln. SWK 104 (Lingkar Utara) Ring Road, Condong Catur, Yogyakarta 55283

Telpon (0274) 486733, ext 154

Fax. (0274) 486400

Hak Cipta dilindungi Undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

DAFTAR REVIEWR	iii
PRAKATA REKTOR	iv
PRAKATA KETUA LPPM	v
DAFTAR ISI	vi
EKONOMI & SOCIAL	ix
The Participation Of Cooperative Members For Welfare And Poverty Alleviation Sri Suryaningsum, Mohammad Irhas Effendi, And Raden Hendri Gusaptono	1
Effects Of Destination Image On The Behavioral Intention In Tourism Village Eny Endah Pujiastuti, S.Sos, Msi	8
Pengaruh Variabel-Variabel Ekonomi Domestik Terhadap Pertumbuhan Cadangan Devisa Indonesia Purwiyanta dan Rini Dwi Astuti	15
Literasi Media Berbasis Smartphone Di Lingkungan Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Yogyakarta Dewi Novianti dan Siti Fatonah	27
Determinan Investasi Asing Langsung (Pma) Di Indonesia : Studi Komparasi Pra Dan Pasca Otonomi Luas Tahun 1990-2014 Jamzani Sodik	33
Pemoderasian Struktur Kepemilikan Institusional Pendekatan <i>Agency Theory</i> Khoirul Hikmah, SE, M.Si,	43
Konvergensi Pendapatan Di D.I. Yogyakarta Didit Welly Udjiyanto dan Joko Susanto	63
Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Indonesia Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Studi Pada Wajib Pajak Umkm) Dian Indri Purnamasari dan Ratna Hindria DPS	69
The Moderation Effect Of Formal Mechanism In The Relationship Between Potential Absorptive Capacity And Realized Absorptive Capacity Ninik Probosari dan Yuni Siswanti	74
Komunikasi Visual Kreatif Berbasis It Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus Di Slb Dharma Bhakti Piyungan, Yogyakarta Sigit Tripambudi, MSi, Dr. Awang Hendrianto Pratomo, S.T, M.T, Yenni Sri Utami, S.IP, M.Si, dan Oliver Samuel Simanjuntak, S.Kom., M.Eng	85
Ministry Of Traditional Oil Wonocolo Village: Potentials, Problems And Handling Anis Siti Hartati dan Marita	87

Analisis Kinerja Pemerintah Desa Berdasarkan Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi Dan Religiusitas	92
Dwi Sudaryati, Sucahyo Heriningsih dan Ruserlistyani	
Model Penataan Lingkungan Dan Manajemen Bencana Melalui <i>Transfer Knowledge</i> Gerakan Muda	99
Purbudi Wahyuni, Ayu Narwastu Ciptahening, dan Istiana Rahatmawati	
The Effect Of Apbdesa Planning, Fulfillment Of Basic Needs, And Institutional Development Of Rural Area (Study On Wonocolo Village Bojonegoro Regency)	106
Lita Yulita Fitriyani, SE, M.Si, Ak.CA dan Marita, SE, M.Si, Ak.CA	
Peningkatan Daya Saing Ukm Batik Melalui Penerapan Sak Etap Dan Pemasaran Berbasis E-Commerce	111
Arum Ardianingsih dan Amalia Ilmiani	
Developing Regional Potentials With Community Empowerment (Case On: Margomulyo District, East Java)	118
Sri Kussujanijatun dan Teguh Kismantoroadji	
Efektifitas Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Usaha Kecil (Studi Pada Pengusaha Kecil Di Bantul Yogyakarta)	124
Suratna	
<i>Intention To Quit</i> , Penyebab Dan Solusinya	134
Hastho Joko Nur Utomo dan Sadeli	
Relasi Agensi Dan Struktur Kuasa Jaman Penjajaan Belanda Dan Jepang	144
Susilastuti	
Model Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Upaya Preventif Konflik Di Yogyakarta	152
Asep Saepudin, SIP.,M.Si	
Profil Pasar Wisatawan Nusantara Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Atribut Atribut Wisata	160
Sigit Haryono dan Lukmono Hadi	
Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dengan Menggunakan Metode Participatory Rural Appraisal Berbasis Komunitas Pada Kelompok Warga Miskin Di Desa Srimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta	168
Surpiko Hapsoro Darpito, Yuni Siswanti, dan Ahmad Muhsin	
Peningkatan Daya Saing UKM Melalui Perancangan Model Pengambilan Keputusan Multi Kriteria Dalam Perencanaan Produksi Menggunakan Metode <i>Game Theoretic Technique</i> (Studi Kasus di UKM Bakpia 808 Minomartani)	173
Puryani, Sutrisno, dan Gunawan Madyono Putro	

Analisis Peningkatan Ekonomi Perajin Akar Kayu Jati Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro, Jawa Timur Teguh Kismantoroadji dan Sri Kussujaniyatun	183
Pengembangan Model Strategi <i>City Branding</i> Pada Kota Kreatif Di Indonesia Guna Mendorong Pembangunan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kota Bandung Sebagai Model Kota Kreatif Indonesia) Prayudi, Ninik Probosari dan Kartika Ayu Ardhanariswari	188
Gender Role Of Women Politicians Muhammad Edy Susilo, Nurul Latifatun Nisa	194
Model Dan Pola Computer Mediated Communication Pengguna Remaja Instagram Dan Pembentukan Budaya Visual Rudi Wibowo dan Edwi Arief Sosiawan	199
Pengaruh Kualitas Penyuluhan Dan Pemahaman Pajak Terhadap Respon Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil Dan Menengah Di Diy Hiras Pasaribu, Asep Saefudin dan Alp. Yuwidiatoro	211
Model Komunikasi Tripartit dalam pembentukan karakter Anak (Studi Kasus pada KB dan TK Amal Insani) Ida Wiendijarti, Reny Triwardani, Christina Rochayanti	221
Study Eksploratory Pemasaran Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dyah Sugandini	229
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Kawasan Pariwisata Perbatasan Di Kabupaten Merauke Machya Astuti Dewi dan Meilan Sugiarto	238
Model Manajemen Komunikasi Bencana Berbasis Komunitas Melalui Rencana Kontijensi Erupsi Gunung Sinabung Puji Lestari, Eko Teguh Paripurno, Arif Rianto Budi Nugroho, Sari Bahagiarti, Awang Hendrianto Pratomo	246
Pengaruh Teman, Peran Komunikasi Keluarga Dan Media Masa Pada Keputusan Menggunakan Narkoba Danang, Lestanta, Arief	253

RELASI AGENSI DAN STRUKTUR KUASA JAMAN PENJAJAAN BELANDA DAN JEPANG

Oleh : Susilastuti

Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip UPN “Veteran” Yogyakarta

Email: susilastuti@gmail.com

Abstrak

Wartawan pada dasarnya agensi yang senantiasa aktif merespon struktur kuasa, terutama bila struktur kuasa dianggap melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan kepentingan publik. Di Indonesia jejak wartawan sebagai agensi ketika berhadapan dengan struktur kuasa bisa ditelusuri sejak jaman Belanda hingga Indonesia mencapai kemerdekaan hingga saat ini. Wartawan tidak akan berhenti merespon semua aktivitas struktur kuasa karena wartawan hadir agar masyarakat mendapatkan informasi yang *favorable* berkecukupan.

Pada awalnya surat kabar yang terbit pada masa jaman penjajahan Belanda belum dimanfaatkan secara baik oleh wartawan namun masih sebatas pada informasi-informasi yang berhubungan dengan kepentingan pemerintah penjajah. Namun seiring dengan perjalanan waktu dan semakin banyaknya anak-anak muda terdidik yang berkecimpung berita-berita yang dimuat di surat kabar semakin keras. Persoalan kesewenang-wenangan terhadap kaum pribumi menyebabkan struktur kuasa membuat regulasi yang mempersempit gerak wartawan.

Penelitian ini mengkaji berdasarkan sumber dokumentasi terkait dengan jejak relasi agensi dan struktur kuasa pada jaman Belanda dan Jepang. Tujuannya untuk melihat bagaimana peran wartawan dalam perjalanan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada jaman penjajahan Belanda dan Jepang, wartawan aktif merespon struktur atas kesewenang-wenangan kepada kaum pribumi dan menyuarakan pentingnya kemerdekaan. Tulisan-tulisan wartawan ini mendapat reaksi struktur kuasa pada waktu itu dengan memenjarakan wartawan, mengasingkan atau melakukan pembredelan terhadap surat kabar tempat wartawan bekerja.

Kata kunci: agensi, struktur kuasa, pergerakan nasional

I. Pendahuluan

Wartawan adalah ujung tombak surat kabar ketika berhadapan dengan struktur kuasa. Wartawan adalah agensi yang aktif bergerak untuk merespon struktur kuasa, terutama bila struktur kuasa melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan kepentingan publik.

Namun demikian dalam setiap jamannya, peran wartawan sebagai agency tidak akan berubah selalu aktif merespon struktur kuasa. Hanya saja keleluasaan dalam merespon struktur kuasa sangat tergantung pada sistem politik di negara dimana wartawan bekerja. Wartawan sebagai agensi memiliki kemampuan aktif merespon struktur dengan mengungkap sisi lain dari fakta dan peristiwa yang tidak dimiliki oleh masyarakat umum. Kemampuan wartawan ini dituangkan dalam karya jurnalistiknya dalam bentuk berita. Agensi menurut

Giddens terdiri atas individu bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, dan peristiwa itu tidak akan terjadi jika saja individu tidak melakukan intervensi (Heidar Nasir, 2012).

Struktur dalam penelitian ini yang dimaksud adalah tata kuasa yang bertahan lama dan memiliki wewenang karena legitimasi yang dimilikinya. Bisa instansi, pemerintah (eksekutif). Lembaga legislatif atau eksekutif. Struktur juga bisa dimaknai aturan-aturan yang menyangkut kepentingan publik.

Pada sistem negara yang otoriter wartawan tidak mampu bergerak secara leluasa karena negara akan mengendalikan arus informasi dari berbagai saluran, termasuk melalui surat kabar. Perbedaan pendapat dalam sistem ini masih diberi ruang namun struktur kuasa melalui regulasi akan mengendalikan sedemikian rupa sehingga perbedaan pendapat bisa diminimalisir.

Pada negara yang menganut sistem komunis, wartawan tidak juga leluasa merespon struktur kuasa, karena partai komunis akan mengendalikan semua media informasi, tidak diperkenankan terjadinya perbedaan pendapat. Otomatis wartawan sebagai agensi tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Namun pada sistem negara liberal, wartawan sebagai agensi mempunyai ruang gerak yang leluasa untuk merespon struktur. Pemahaman masyarakat yang baik tentang demokrasi menyebabkan masyarakat bisa secara baik menyeleksi semua informasi yang ditulis oleh wartawan.

Sementara pada negara yang menganut sistem bebas bertanggungjawab menyebabkan wartawan sebagai agency harus bisa menyelaraskan dengan dinamika struktur kuasa karena posisi media tempat wartawan bekerja adalah mendukung semua program pembangunan yang dilakukan oleh struktur kuasa.

Pada masa penjajahan, maka sistem politik yang berlaku adalah sistem politik negara yang menjajah, termasuk regulasi yang diperuntukkan bagi masyarakat jajahannya. Hal ini juga terjadi di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Sistem politik yang diterapkan tidak memberikan ruang gerak yang cukup bagi masyarakat termasuk wartawan untuk menyampaikan aspirasinya.

Jaman penjajahan ini, wartawan biasanya juga menjadi tokoh pergerakan nasional. Walaupun pada awalnya, surat kabar di jaman penjajahan Belanda sebagai alat untuk menawarkan iklan yang berhubungan dengan komoditas pertanian. Seiring dengan perjalanan ketika orang-orang pribumi bekerja di surat kabar yang dimiliki Belanda, muncul kesadaran bahwa surat kabar menjadi sarana yang paling strategis untuk membangkitkan kesadaran tentang pentingnya kemerdekaan di kalangan masyarakat pribumi. Hal ini juga terjadi pada masa pendudukan Jepang.

Wartawan yang berkecimpung di surat kabar biasanya juga menjadi tokoh pergerakan sehingga surat kabar pada masa kolonial sering menjadi alat kepentingan organisasi serta sarana untuk menggalang kekuatan masyarakat untuk mencapai kemerdekaan. Secara otomatis struktur kuasa berusaha untuk menghambat dan merespon tulisan wartawan dengan alat kekuasaan yang dimiliki. Tidak jarang wartawan harus mendekam di penjara atau dibuang di pengasingan.

Berkaitan dengan hal itu menarik untuk mencermati gerak wartawan sebagai agency ketika berhadapan dengan struktur kuasa pada jaman penjajahan Belanda dan jaman penjajahan Jepang. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana wartawan sebagai agency ketika berhadapan dengan struktur kuasa pada jaman penjajahan Belanda dan jaman penjajahan Jepang?

Metode yang digunakan untuk melakukan kajian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan (menggambarkan) fakta atau fenomena tertentu. Dalam penelitian ini fenomena yang diteliti adalah wartawan sebagai agency ketika berhadapan dengan struktur kuasa. Data diperoleh melalui penelusuran pustaka.

II. Pembahasan

Keaktifan wartawan merespon struktur kuasa pada dasarnya bisa ditelusuri melalui keberadaan surat kabar di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kehadiran surat kabar ini membuka ruang bagi masyarakat Indonesia yang terdidik untuk menyampaikan pemikirannya atas kondisi masyarakat pribumi di bawah pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang.

Surat kabar diperkenalkan pertama kali pada abad ke-18. Namun surat kabar yang terbit pada waktu itu di bawah kendali pemerintah kolonial dan diterbitkan sendiri oleh orang Belanda. Sementara orang-orang Indonesia mendapatkan pengalaman sebagai jurnalis ketika bekerja di dalamnya. Surat kabar yang pertama kali terbit pada masa penjajahan Belanda adalah *Bataviase Novels* (1744-1746). Surat kabar ini tutup karena adanya larangan dari pemerintah Belanda di Eropa karena sedang terjadi perang antara Belanda dan Perancis, antara Belanda-Inggris (Tribuana Said, 1998).

Tahun 1827 ada wartawan Belanda bernama W Bruining yang datang ke Batavia untuk mendirikan percetakan. Awalnya tidak diijinkan namun kemudian mendapatkan ijin. Ia kemudian mendirikan *Bataviasche Advertentieblad*, *Nederlands Indiesche Handelsblad* (1829), *Soerabajasche Courant* (1831), *Semarangsche Advertiserblad* (1845) Seiring dengan perjalanan waktu dan sudah adanya pengalaman dari orang-orang pribumi yang bekerja di surat kabar yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial maka 1855 untuk pertama kalinya terbit surat kabar dengan menggunakan bahasa Jawa adalah Bromartani di Surakarta, berbahasa Melayu adalah surat kabar Bahasa Melajoe di Surabaya (1856), *Soerat Chabar Betawie* (1858), *Selompot Melajoe* (1860), *Bintang Timoerdi Surabaya* (1862), *Djoeroe Martani di Surakata* (1864) dan lainnya.(TribuanaSaid, 1998)

Walaupun pada masa kolonial tidak secara eksplisit menunjukkan respon wartawan terhadap struktur kuasa – waktu itu – pemerintah Hindia Belanda namun pemerintah kolonial juga telah melakukan tindakan represi terhadap wartawan yang dinilai terlalu berani. Redaktur *Samarangsche Courant* dan penulis *Java Bode* di usir dari Indonesia, sementara redaktur *Celebes Courant*, *Djoeroe Martini* dibawa ke pengadilan dengan perkara delik (Tribuana Said, 1998). Orang-orang yang melibatkan diri dalam bidang pers pada masa pemerintahan Belanda HM Van Bode dan W.J van Harren Norman melalui harian *Java Bode* (1858) memberikan perhatian yang kritis terhadap kebijakan pemerintah dan mendorong agar

pemerintah Belanda mengakhiri jajahannya di Indonesia. Java Bode yang merupakan media resmi pemerintah kolonial tetap dengan bahasa yang lebih halus. Wartawan yang pada masa pergerakan sangat aktif menyuarakan suara-suaranya di berbagai surat kabar yang terbit pada masa itu. Implikasi dari kekritisannya adalah pengekangan oleh pemerintah Belanda.

Wartawan Belanda di era itu juga banyak direpresi oleh pemerintah kolonial hanya karena tulisannya tidak sejalan dengan pemerintah Belanda. Mereka diancam akan dibuang bahkan ada diantaranya mendapat hukuman badan. Beberapa diantaranya, Bissschop Grooff (1845), L van Vliet (1846), H.J Lion (1851), S.E.W Rooda van Eisinga (1846), JJ Nosse (1864), Dr.ICPK Winckel (1870) (Abdurrachman Surjomihardjo, 2002)

Keberanian wartawan bersikap kritis kepada pemerintah kolonial Belanda mulai tampak pada awal abad ke-20. Awal tahun 1900-an, wartawan melalui tulisan-tulisannya merespon struktur sehingga menimbulkan ketegangan (*contentious*). Tulisan wartawan juga direspon oleh strukur.

“...wartawan jangan coba-coba menunjukkan bahwa ia mempunyai pendapat sendiri atau berusaha mengadakan penyelidikan sendiri atau berusaha mengadakan penyelidikan yang bebas atas dasar informasi yang disampaikan kepadanya, atau yang paling tidak masuk akal, mengancam tindakan penguasa ini atau yang lainnya karena ia akan menghadapi resiko kemarahan penjahat yang ditimpakan kepadanya, dengan segala akibat yang menyertai dan orang yang baik hati yang martabatnya telah diserang itu dengan serta merta akan berubah menjadi seorang lalim yang mengerikan tanpa membawa hikmah bagi si wartawan yang tidak tahu bagaimana mengurus pekerjaannya sendiri...” (Edward C Smith, 1983)

Wartawan yang bekerja diberbagai surat kabar juga merupakan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Tribuana Said (2013) menyebutkan wartawan pergerakan Indonesia memiliki motivasi ingin menegakkan kemerdekaan guna mencapai kehidupan yang adil dan sejahtera, serta menggunakan surat kabar sebagai sarana dan prasarana perjuangan bangsa. Wartawan dan pers pergerakan bermula tahun 1908.

Wartawan yang bersikap kritis tidak hanya wartawan pribumi tetapi juga wartawan Belanda yang mencoba bersikap kritis terhadap pemerintah kolonial serta mendorong semangat pejuang pergerakan untuk memeperjuangkan kemerdekaannya. Misalnya saja E.FE.Douwes Dekker yang dikalangan pers dikenal dengan nama Dr. Danudirja Setiabudhi. Karir awalnya sebagai wartawan dimulai dengan menjadi wartawan di surat kabar *Bataviaasch Nieuwsblad*. Ia seorang wartawan warga negara Belanda yang memiliki kepedulian terhadap nasib masyarakat pribumi. Tahun 1912 ia mendirikan majalah *Het Tijdschrift* yang sangat revolusioner. Kemudian mendirikan *De Express* yang membawa gagasan kemerdekaan bagi Indonesia dan secara terang-terangan menentang dominasi struktur kuasa pada waktu itu. Sebagai wartawan Douwes Dekker ini sangat berani menentang atau berseberangan dengan struktur kuasa sehingga dua kali sempat berurusan dengan pemerintah kolonial.

Ia seorang wartawan yang memiliki kecakapan dalam menangkap fakta dengan cepat, dan dapat secara cepat mengolah dalam bentuk berita. Kekritisannya didorong oleh kenyataan

yang dilihatnya bahwa kemelaratan bangsa pribumi disebabkan oleh eksploitasi sumberdaya untuk kepentingan pemerintah kolonial dengan mengabaikan kesejahteraan masyarakat pribumi. ((Priyambodo, 2013;Rosihan Anwar, 2009; Abdurrachman Surjomihardjo, 2002;Tribuana Said, 1998))

Pada masa penjajahan kolonial, wartawan Indonesia yang menggunakan surat kabar untuk propaganda dan pembentukan pendapat umum di Indonesia antara lain Tirtoadhisoorjo yang menerbitkan surat kabar Soenda Berita (1903-1905), Medan Priyayi. Ia berani menulis kecaman-kecaman pedas terhadap pemerintah Kolonial Belanda. Kecaman hebat yang dilontarkan terhadap tindakan-tindakan seorang kontrolir yang menyebabkan ia ditangkap dan disingkirkan dari Jawa. Ia ditangkap dan dibuang di Pulau Bacan, Maluku.

Wartawan yang aktif menulis di surat kabar pada masa penjajahan Belanda di awal abad 20 pada akhirnya juga aktif dalam berbagai pergerakan yang mendorong terwujudnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Misalnya, Ir Soekarno yang namanya pernah tercantum sebagai redaktur di surat kabar Benteng Priangan. M Hatta menjadi pimpinan harian Oetoesan Indonesia.

Abdul Rivai adalah seorang dokter sekaligus wartawan. Profesi wartawan digunakan sebagai alat untuk perjuangan untuk mencapai kemerdekaan bangsanya. Selama di Belanda, ia menjadi wartawan yang menulis di berbagai surat kabar di Belanda dan mendirikan majalah Bintang Hindia (1902). Selama di Belanda ia juga membuat reportase tentang kehidupan mahasiswa Indonesia di Belanda yang senantasa diawasi *raadsman*. Sikap keras dan keberaniannya memberikan kritik dilunakkan Pemerintah Belanda dengan mengangkatnya sebagai anggota *Volksraad* (Dewan Rakyat) di Jakarta. Namun ia tetap konsisten pada garis perjuangan yaitu Indonesia harus merdeka. Ia antara lain aktif menjadi wartawan di surat kabar Bintang Timur (Priyambodo, 2013, Rosihan Anwar, 2009).

Djamaluddin Adinegoro merupakan wartawan yang menerbitkan harian Tjahya Hindia yang terbit di Sumatera, serta ikut menerbitkan majalah perjuangan Mimbar Indonesia. Majalah mingguan ini menuliskan semangat perjuangan serta bernafaskan republikan (Priyambodo 2013).

Wartawan yang aktif menulis di surat kabar pada masa penjajahan Belanda di awal abad 20 pada akhirnya juga aktif dalam berbagai pergerakan yang mendorong terwujudnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Misalnya, Ir Soekarno yang namanya pernah tercantum sebagai redaktur di surat kabar Benteng Priangan. M Hatta menjadi pimpinan harian Oetoesan Indonesia. Mengingat wartawan Indonesia yang bekerja di berbagai surat kabar waktu itu juga tokoh pergerakan maka mereka juga tidak luput dari pengekan pemerintah kolonial.

Mengingat wartawan Indonesia yang bekerja di berbagai surat kabar waktu itu juga tokoh pergerakan maka mereka juga tidak luput dari pengekan pemerintah kolonial. Lebih-lebih wartawan pergerakan ini menggunakan media tempatnya bekerja untuk menyuarakan semangat pergerakan untuk kemerdekaan Indonesia sehingga pemerintah kolonial kemudian mulai memperketat penerbitan pers. Respon pemerintah Belanda untuk

membungkam kekritisian wartawan adalah mengeluarkan *Persbreidel Ordonantie* yang diberlakukan bulan September 1931. Peraturan tersebut berisi empat hal yang intinya gubernur jendral bisa mengeluarkan larangan cetak, menerbitkan dan menyebarkan suatu harian, mingguan atau majalah untuk menjamin kepentingan umum (Tribuana Said, 1988). Akibatnya, wartawan lebih berhati-hati dalam menulis hal ini sejalan dengan kebijakan redaksi tempat wartawan itu bekerja untuk menghindari penindakan dari pemerintah Hindia Belanda.

Menurut tulisan Sudjarwo Tjondronegoro sebagai koresponden Antara dari tahun 1931-1936 tercatat ada wartawan-wartawan yang bekerja di 27 penerbitan yang pernah dihukum oleh Belanda karena berita atau pikiran mereka (Tribuana Said, 1998). Beberapa wartawan pada jaman penjajahan Belanda pernah mendapat tekanan dari pemerintah antara lain, Ir Taher Tjindrabumi akibat tulisannya tentang Pemberontakan di atas kapal De Zeven Privincien. Tulisannya ini mendapatkan reaksi struktur sehingga ia dihukum akibat tulisannya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1. Reaksi Struktur Terhadap Tulisan Wartawan Awal Abad 20.

Nama Wartawan	Reaksi Struktur
Ir Taher Tjindrabumi	Di hukum
Amir Sjarifudin	Dihukum
Muhmmad Yamin	Dihukum
Rangkayo Rasuda Said	Dipenjarakan di Semarang
Bakrie Suraatmadja	Dihukum
E.M Dahlan	Dihukm
Supangat	Dihukum
Suyitno	Dihukum
Maruto Nitimiharjo	Dihukum
Samawi	Disekap dalam kamp tahanan pemerintah Belanda
Adam Malik	Disekap dalam kamp tahanan pemerintah Belanda
SK Trimurti	Disekap dalam kamp tahanan pemerintah Belanda
Bratanata	Disekap dalam kamp tahanan pemerintah Belanda
Abdul Hakim	Disekap dalam kamp tahanan pemerintah Belanda

(Diolah dari Tribuana Sahid, 1998)

Tahun 1942 Jepang menguasai Indonesia, namun perubahan struktur kuasa ini justru menyebabkan wartawan tidak mampu bergerak. Ketika struktur kuasa dikuasai Jepang diberlakukan Osamu Seri No 16 tentang pengawasan badan-badan pengumuman dan penerangan dan penilikan pengumuman dan penerangan. Pasal 3 Osamu Seri 6 menyebutkan "... *Terlarang menerbitkan barang tjetakan yang berhoeboeng dengan pengemoeman ataoe penerangan baik yang beroepa penerbitan setiap hari, setiap minggoe, boelan maoepoen penerbitan dengan tidak tertentoe waktoenya, ketujuali yang oleh badan-badan yang soedah mendapat izin* " Atas dasar ketentuan itu semua surat kabar Belanda dan Cian tidak boleh terbit. Struktur kuasa menerbitkan surat kabar pribumi dengan mengubah nama sesuai keinginannya (Tribuana Said, 1998).

Wartawan di era pendudukan Jepang sangat sulit bergerak karena tulisan berupa berita atau artikel sebelum diterbitkan diperiksa terlebih dahulu oleh badan sensor dan terakhir diberi paraf petugas Domai. Bisa dikatakan wartawan yang bekerja di surat kabar pribumi yang telah berubah nama oleh struktur kuasa pada waktu tidak melakukan perannya sebagai jurnalis. Mereka hanya berstatus pegawai tanpa melakukan tugas jurnalistik.

Namun wartawan yang juga tokoh pergerakan kemerdekaan tidak berdiam diri, selaku agency yang aktif untuk menggelorakan semangat perjuangan mencapai kemerdekaan tetap melakukan perlawanan dengan menyisipkan pesan-pesan nasionalisme dalam tulisan-tulisan yang dimuat di media mereka.

Pada jaman Jepang, salah satu wartawan yang aktif merespon struktur adalah Adam Malik. Ia mendirikan LKBN Antara sebagai sarana untuk memperkokoh perjuangan bangsa. Peristiwa heroik yang berhasil dilakukan adalah menerbitkan isi naskah Proklamasi Kemerdekaan untuk di LKBN Antara dengan berbagai cara agar bisa lepas dari pengawasan Jepang, ia melakukan dengan cara *mendetekan* (membacakan-red) kepada redaktur yang ada di kantor LKBN Antara. Jepang merasa *kecolongan* dan memerintahkan pencabutan berita, namun perintah tersebut tidak ada artinya karena berita tentang kemerdekaan Indonesia sudah tersiar luas (Priyambodo, 2013).

Pada jaman penjajahan Jepang wartawan Indonesia yang aktif merespon struktur dan ditangkap oleh pemerintah antara lain Adam Malik, Pandoe Kartowigoena, Sipahoetar, Adoel Hakim, Samawi, Asmara Hadi, Soeroen Bratanata, Trimurty dan Djojo Pranoto. Mereka ditahan ke Garut kemudian dibawa ke Nusakambangan (SPS, 1971)

Berdasarkan paparan di atas, wartawan sebagai agensi sangat aktif merespon, terutama berkaitandengan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat pribumi. Ketidakpuasan ini kemudian mendorong wartawan untuk menggelorakan semangat kemerdekaan. Gerak aktif wartawan sebagai agensi terhadap struktur kuasa memaksa mereka untuk setiap saat berhadapan dengan struktur kuasa, dengan segala resikonya.

III. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur dapat ditarik beberapa simpulan bahwa pada jaman penjajahan Belanda cikal bakal keaktifan wartawan dimulai adanya ketidakadilan struktur kuasa terhadap kaum pribumi. Wartawan yang aktif merespon struktur tidak hanya wartawan pribumi tetapi juga wartawan Belanda yang tidak puas dengan cara pemerintahnya memperlakukan kaum pribumi.

Wartawan yang aktif merespon struktur di era penjajahan Belanda juga menjadi tokoh pergerakan nasional dan menjadi pionir berdirinya organisasi-organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Wartawan di era itu menjalankan peran sebagai wartawan sekaligus pejuang.

Pada jaman Jepang, wartawan Indonesia yang telah memiliki pengalaman pada masa penjajahan Belanda, justru bersiasat untuk menggunakan media tempatnya bekerja sebagai sarana mengobarkan semangat perjuangan. Pesan-pesan yang menggelorakan semangat

perjuangan senantiasa disisipkan dalam tulisannya. Siasat itu bukan tanpa resiko karena wartawan Indonesia pada jaman Jepang banyak yang ditangkap dan di penjarakan.

Daftar Pustaka

- Anwar, Rosihan, 2011, *Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia*, Jilid 3, PT Kompas Gramedia, Jakarta
- Astraatmadja, Atmakusumah, 1999, *Tuntutan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspresi*, Yayasan Tifa Jakarta
- Giddens, Anthony, 2010, *Teori Strukturasi : Dasar-dasar pembentukan struktur Social masyarakat*, terjemahan Maufur dan Daryatno, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Nasir, Heidar, 2012, *Memahami strukturisasi dalam perspektif sosiologis Giddens*, Jurnal Sosiologi Reflektif, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2012
- Priyambodo, dkk, 2013, *Ensiklopedi Pers Indonesia*, PWI Pusat Jakarta
- Oetama, Jacob, 1985, *Apa Maunya Wartawan, dalam Bunga Rampai Catatan Pertumbuhan Sistem Pers Indonesia*, editor T Atmadi, Pantja Simpati
- Said, Tribuana, 1988, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*, Haji Mas Agung Jakarta.
- Smith, C Edward C, 1983, *Sejarah Pembredelan pers di Indonesia*, Penterjemah, Atmakusumah, Alex A Rachim, Arie Wikdjo Broto, Penerbit Grafitti, Jakarta
- Surjohamihardjo, Abdurrahman (edt), 2002, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Taufik, L, 1977, *Sejarah perkembangan pers di Indonesia*, Trinity Press, Jakarta